

## **Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Marina Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai**

**\*Fardina Ningsih<sup>1</sup>, Ahmad Fitra Yuza<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

<sup>2</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

\*Corresponding Author : [fardinaningsih@student.uir.ac.id](mailto:fardinaningsih@student.uir.ac.id)

### **Abstrak**

Kajian ini menganalisis tata kelola kolaboratif didalam pengembangan pariwisata di Pantai Marina, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai. Dengan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hasil menunjukkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta berdampak positif, seperti peningkatan jumlah pengunjung dan fasilitas. Namun, kendala seperti kurangnya komunikasi rutin, perbedaan kepentingan, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pariwisata masih menghambat efektivitas kolaborasi. Tantangan lain meliputi ketidakpahaman masyarakat mengenai tata kelola pariwisata dan minimnya kelompok sadar wisata (POKDARWIS). Rekomendasi kajian ini mencakup peningkatan dialog antara pemangku kepentingan, edukasi masyarakat, dan perbaikan infrastruktur Pantai Marina. Hasil ini diharapkan mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kota Dumai dan menjadi referensi kajian tata kelola kolaboratif.

**Kata kunci:** *Collaborative Governance, Pengembangan, Pariwisata*

### **Abstract**

*This study analyzes Collaborative Governance in tourism development in Marina Beach, Medang Kampai District, Dumai City. With a qualitative approach, data is obtained through interviews, observations, and documentation studies involving the government, the private sector, and the community. The results show that collaboration between the government and the private sector has a positive impact, such as an increase in the number of visitors and facilities. However, obstacles such as lack of regular communication, differences in interests, and low public awareness of tourism still hinder the effectiveness of collaboration. Other challenges include the public's lack of understanding of tourism governance and the lack of tourism awareness groups (POKDARWIS). The recommendations of this study include increased dialogue between stakeholders, community education, and improvement of Marina Beach infrastructure. These results are expected to support the development of sustainable tourism in Dumai City and become a reference for Collaborative Governance research.*

**Keywords:** *Collaborative Governance, Development, Tourism*

## PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor terbesar dan tercepat di dunia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan yang diperoleh dari sektor pariwisata memberikan distribusi yang besar bagi pembangunan daerah. Diantara industri yang berkembang pesat dan memberikan sumbangan besar bagi pertumbuhan ekonomi dunia adalah pariwisata. Salah satu sumber pendapatan potensial adalah pariwisata negara, khususnya untuk pemerintah di tingkat lokal. Sektor pariwisata telah menjadi salah satu penggerak utama penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir. Setiap daerah memiliki suatu potensi pariwisata yang sangat besar, baik itu potensi alam, budaya, juga buatan manusia, yang dapat dikembangkan dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rekreasi dan hiburan. Salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan adalah pariwisata dan harus dikelola dengan baik.

Dari sektor pariwisata juga dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak, retribusi parkir dan karcis atau dapat mendatangkan devisa dari para wisatawan yang berkunjung. Adanya pariwisata juga akan menumbuhkan usaha-usaha ekonomi disekitar area wisata dan menunjang kegiatannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menunjukkan dampak positif dalam pembangunan perekonomian suatu daerah.

Salah satu Kabupaten/Kota yang memiliki potensi wisata yang indah yaitu Kota Dumai. Kota Dumai merupakan kota yang ada di Provinsi Riau. Kota Dumai dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan Kabupaten/Kota Baru di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Astuti et al., 2020).

Kajian ini difokuskan pada objek wisata Pantai Marina yang terletak di Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai. Berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai 2019-2039, Pantai Marina termasuk dalam kawasan yang diperuntukkan untuk pengembangan pariwisata. Selain itu, pantai ini juga dikategorikan sebagai kawasan strategis yang memiliki nilai penting dari aspek sosial dan budaya, dengan menonjolkan tradisi dan adat istiadat khas Melayu.

Di antara berbagai destinasi wisata lainnya, Pantai Marina menonjol sebagai kawasan alam unggulan yang mengintegrasikan keindahan alam dengan kebudayaan lokal. Terletak di bagian utara Kota Dumai, tepatnya di Jalan Arifin Ahmad, Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, pantai ini berada di atas lahan seluas 42 hektar yang merupakan aset Pemerintah Kota Dumai. Pada Mei 2015, Pantai Marina resmi dibuka oleh Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Kepemudaan dan Pariwisata, dengan peresmian yang dipimpin langsung oleh Walikota Dumai saat itu, disaksikan oleh ratusan warga

Pada tahun 2021 silam Pemerintah Kota Dumai merencanakan akan membangun Dumai Ecopark dan Masjid Apung. Dan pada tahun 2023 Walikota Dumai resmi membuka Dumai Ecopark di Kawasan Pantai Marina Kecamatan Medang kampai Kota Dumai dengan menggandeng pihak swasta, akan tetapi untuk Pembangunan masjid apung belum terlihat hingga saat ini (Kominfo Dumai)

Dari pra-observasi awal yang dilakukan oleh penulis setelah memasuki objek wisata tersebut, fasilitas dan sarana pra sarana yang ada di Pantai Marina banyak terdapat nya fasilitas yang tidak terawat. Saat ini, objek wisata Pantai Marina Kecamatan

Medang Kampai masih terlihat kurangnya perawatan terhadap fasilitas-fasilitas yang telah di sediakan seperti pondok Pantai yang tidak terawat, mushola yang tidak berawat, toilet umum yang tidak terawat, pos penjagaan yang tidak ada penjagaan serta sampah yang masih berserakan di tepi Pantai. Melihat permasalahan tersebut membuat kurangnya minat dan ketertarikan pengunjung sangat kurang jika di dibandingkan dengan Pantai milik pribadi seperti Pantai Koneng yang bersebelahan di Pantai Marina.

Selain itu, pengembangan pariwisata Pantai Marina masih menemui berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, yaitu minimnya akses untuk menuju objek wisata, keterbatasan sumber daya dalam pengembangan pariwisata. Kegiatan promosi dengan pemanfaatan teknologi masih belum dilakukan karena masyarakat belum bisa memanfaatkan media sosial atau *website* secara berkelanjutan. Komunikasi antara pedagang, masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya menjaga lingkungan serta pemanfaatan pengelolaan pariwisata berkelanjutan masih kurang efektif. Akibatnya kesadaran masyarakat akan pengembangan dan pengelolaan pariwisata masih rendah.

Berbagai pemangku kepentingan seharusnya melakukan kerja sama melalui tahapan-tahapan kolaborasi dalam rangka mencapai tujuan pengembangan pariwisata yang baik di kawasan Pantai Marina (Ardiansyah, Purnaweni, et al., 2023). Karena di dalam *collaborative governance* pemerintah dan non pemerintah harus aktif berpartisipasi. Sehingga pariwisata dapat berkembang dengan sesuai yang di harapkan.

Berdasarkan konteks di atas, berikut ini adalah beberapa fenomena yang terjadi:

1. Pantai Marina melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang seharusnya melakukan kerja sama melalui tahapan-tahapan kolaborasi dalam rangka mencapai tujuan pengembangan pariwisata yang baik di kawasan Pantai Marina. Hal ini sering mengakibatkan kurangnya pengelolaan dan perbedaan kepentingan dan prioritas yang sulit untuk disatukan.
2. Lemahnya komunikasi dan strategi promosi antar stakeholders yang terlibat, sehingga tidak terbinanya koordinasi antar lembaga pemerintahan, masyarakat, dan swasta.

## METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono, metode kajian kualitatif bertujuan untuk mengkaji fenomena dalam konteks alami, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi (gabungan metode), analisis data bersifat induktif, dan hasil kajian lebih menitikberatkan pada pemahaman makna daripada menghasilkan generalisasi. Dalam studi ini, data yang diperoleh mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen, serta berbagai materi visual seperti foto, video, sumber internet, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kehidupan individu atau kelompok (Sugiono, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pariwisata (dalam Sunu Astuti & Warsono, 2020) berasal dari bahasa Sansekerta dan merupakan gabungan dari kata *Pari* dan *Wisata*. Kata *wisata* yang berarti pelayaran, dan *pari* yang berarti keseluruhan, keseluruhan, atau semua.

Guyer (1993) (dalam Takome et al., 2021) mengemukakan gagasan bahwa pariwisata merupakan fenomena kontemporer yang bermula dari kebutuhan akan udara dan kesehatan, kesadaran akan keindahan alam, kesenangan dan kenikmatan kosmos,

dan yang terpenting, interaksi yang berkembang antara berbagai bangsa dan kelas sosial dalam masyarakat manusia sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan, industri, dan perniagaan serta kemajuan teknologi transportasi.

Pengembangan pariwisata menurut Maryani (2019) (Fadjarajani et al., 2021) adalah pertumbuhan dalam komponen-komponen yang terkait dengan pariwisata dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah pengunjung, pengeluaran, dan meningkatkan kebahagiaan pengunjung sambil menjaga lingkungan destinasi. Hal ini penting karena perencanaan memerlukan tindak lanjut, yang mencakup penanganan sosial ekonomi dan tenaga kerja fisik. Perlu disebutkan bahwa satuan besaran sering kali diperlukan untuk perencanaan.

Menurut Agranoff & McGuire (Gusmiara Danasta & Kurniawan, 2021) Tata kelola kolaboratif dianggap sebagai bentuk kerja sama horizontal atau kolaborasi yang melibatkan peserta dari beberapa sektor. Kerja sama antarorganisasi yang terlibat diperlukan karena ekspektasi pelanggan sering kali melampaui fungsi dan kemampuan organisasi selama proses kolaborasi. Tujuan kolaborasi adalah untuk meningkatkan manajemen lintas sektor perusahaan publik atau swasta, alokasi kewenangan, dan tata kelola dengan membuatnya lebih terorganisasi dan efisien.

Collaborative Governance Ansell Gash (2007) (dalam Ariesmansyah et al., 2023) memiliki empat komponen, tiga di antaranya memengaruhi kerja sama dan lima tindakan saling terkait yang membentuk proses kolaborasi. Situasi Awal, Keadaan pertama yang disebutkan adalah keadaan pemangku kepentingan sebelum bekerja sama. Keadaan awal berpotensi untuk memfasilitasi atau menghambat kerja sama. Protokol atau pedoman mendasar untuk kerja sama tim disebut sebagai desain kelembagaan. Komponen ketiga adalah kepemimpinan fasilitatif, yang mengacu pada pendekatan dan kapasitas pemimpin untuk memengaruhi pemain. Komponen keempat adalah proses kerja sama itu sendiri, sedangkan tiga komponen pertama adalah komponen yang memengaruhi pengembangan tata kelola kolaboratif.

Untuk mengelola pariwisata, pemerintah bekerja sama dengan pihak ketiga yang terlibat untuk pengelolaan pariwisata, dalam hal ini Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, pihak ketiga (Bayan Resto), dan Masyarakat setempat membuat sebuah kolaborasi. Bila dikaitkan dengan gagasan kerjasama, maka kerjasama merupakan upaya menyatukan semua sektor, baik pemerintah maupun nonpemerintah, untuk mengelola, menyelenggarakan, dan mengendalikan urusan bersama agar dapat memperoleh hasil yang sebesar-besarnya proses menuju Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Marina Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai. Terdapat beberapa tahapan yang merujuk pada konsep Ansell dan Gash (2008), yaitu: Kondisi pertama adalah kondisi awal; yang kedua adalah desain kelembagaan; yang ketiga adalah kepemimpinan fasilitatif; dan yang keempat adalah proses kolaboratif. Penulis memberikan deskripsi berikut mengenai keempat tahap ini :

### **1. Starting Conditional (Kondisi Awal)**

Anshell dan Gash mengusulkan kondisi awal sebagai salah satu indikator utama tata kelola kolaboratif yang dapat digunakan untuk menilai seberapa sukses tata kelola kolaboratif diterapkan oleh semua peserta. Kondisi pertama meliputi: kondisi dimana pelaku kepentingan yang dilakukan oleh berbagai lembaga baik secara langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan fenomena seperti mempunyai visi dan misi serta kepentingan bersama yang akan dicapai, Kondisi awal dalam collaborative governance sangat menentukan dasar dari Tingkat kepercayaan, masalah/konflik serta

modal sosial yang dapat menjadi peluang dan tantangan dalam collaborative governance.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan Indikator Kondisi Awal menunjukkan bahwa kolaborasi belum optimal akibat perbedaan kepentingan dan antagonisme antar pihak. Pemerintah lebih fokus pada pendapatan dari Pantai Marina, sementara pihak ketiga kesulitan meraih keuntungan karena kurangnya edukasi bagi masyarakat setempat dan pengunjung.

## **2. Institutional Design (Desain Kelembagaan)**

Prinsip dasar dari proses kerja sama adalah desain kelembagaan. Pedoman dasar untuk kolaborasi disebut sebagai desain kelembagaan. Ini merupakan komponen penting karena memberikan validitas prosedural pada proses kerja sama. Desain kelembagaan ini sangat menekankan pada aturan main bagi mereka yang terlibat dalam kolaborasi, pembentukan forum, bentuk pedoman implementasi yang eksplisit, dan keterbukaan implementasi kolaborasi. Indikator desain konstitusional dalam collaborative governance dalam pengembangan pariwisata di Pantai Marina Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai yaitu Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Dumai Tahun 2023-2025 Pasal 1 ayat 1 yang dimana Pantai Marina masuk kedalam Wisata Alam yang dikembangkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan pada Indikator Desain Kelembagaan dapat disimpulkan yaitu sudah adanya aturan yang jelas dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang di pegang oleh pihak pemerintah, surat ini menjadi bukti yang sah antara pihak Pemko dan pihak ketiga yang tercermin dalam kesepakatan yang mengatur hak dan kewajiban antara dua belah pihak, sehingga memperlancar proses kerja sama dan meminimalkan potensi konflik di masa depan.

## **3. Fasilitative Leadership (Kepemimpinan Fasilitatif)**

Kolaborasi sering kali diwarnai oleh potensi perselisihan yang signifikan dan munculnya keraguan antar pemangku kepentingan. Namun, di sisi lain, keinginan kuat dari para pihak untuk berkontribusi tetap ada. Oleh karena itu, diperlukan sosok pemimpin yang mampu membangun kepercayaan dan diterima oleh semua pihak sebagai penengah. Pemimpin ini memainkan peran kunci sebagai mediator sekaligus fasilitator dalam mewujudkan tata kelola kolaboratif yang efektif.

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator Kepemimpinan Fasilitatif, diartikan collaborative governance dalam pengembangan Pantai Marina Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai sudah melibatkan stakeholders, ini merupakan unsur yang dapat membangun suatu collaborative governance berjalan sesuai dengan yang diinginkan tentunya. Tetapi ada hal yang menjadi melemahkan collaborative governance itu sendiri yang timbul diluar dugaan, peran stakeholders masing-masing sudah terlibat, tetapi ada saja terjadi perbedaan keinginan atau miss communication antar pihak sehingga memengaruhi proses jalannya kolaborasi, proses kolaborasi akan terlaksana dengan baik apabila mempercayakan pihak mediator sebagai peleraai apabila terjadi konflik yang tidak selesai, kurangnya kepercayaan antar stakeholder dan menimbulkan adanya dorongan untuk berkontribusi dalam program, maka proses kolaborasi bisa saja menjadi terlaksana apabila memiliki pemimpin yang dihormati dan dipercayakan.

## **4. Collaborative Process (Proses Kolaboratif)**

Proses kolaborasi ialah proses dimana kolaborasi diawali dengan dialog tatap muka yang akan meningkatkan kualitas kolaborasi tersebut, setelah dilakukan dialog

tatap muka terbentuk dan sering dilakukan maka dari situlah terbentuk kepercayaan yang baik antara pihak yang berkolaborasi yang akan berpengaruh pada komitmen terhadap proses, selain itu apabila komitmen terhadap proses sudah terjadi akan terbangun pula pemahaman bersama yang akan membahas visi dan misi yang jelas didalam mengidentifikasi masalah bersama yang akan menjawab permasalahan bersama didalam pencapaian hasil bersama antar pihak yang berkolaborasi.

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator proses kolaboratif yaitu Proses Kolaborasi dalam collaborative governance diawali dengan Dialog Tatap Muka, yang dimana penulis menemukan permasalahan yang dimana dialog tatap muka antar stakeholders tidak dilakukan sehingga menghambat proses kolaborasi itu sendiri. Dalam sub indikator membangun kepercayaan kepercayaan antar stakeholders sudah cukup baik, hanya saja penulis menemukan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena adanya sarana prasarana yang tak kunjung dibenahi. Dalam sub indikator komitmen dalam proses bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi sudah baik, hanya saja tidak bisa dibantahkan bahwa setiap pihak yang terlibat pasti memiliki kepentingan dan tujuan masing-masing. Dalam sub indikator pemahaman bersama dapat disimpulkan bahwa pihak pemerintah kurang melakukan kegiatan promosi sehingga calon pengunjung tidak mendapatkan informasi menarik sehingga pengunjung kurang tertarik untuk datang ke pantai tersebut dan kurangnya kesadaran Masyarakat karena tidak adanya Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang mengakibatkan kebiasaan yang kurang baik yang sering dilakukan sehingga menimbulkan dampak negatif untuk perkembangan pantai tersebut. Pada sub indikator Hasil Sementara yang dapat dilihat dari kolaborasi ini adalah pengelolaan Pantai jadi lebih teratur, selain itu dengan adanya kolaborasi ini berdampak pada ekonomi masyarakat setempat yang mendapatkan lapangan pekerjaan dan meningkatnya UMKM masyarakat setempat.

## SIMPULAN

Dari hasil kajian yang penulis lakukan terkait dengan *Collaborative Governance* didalam Pengembangan Pariwisata Pantai Marina Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai penulis dapat menarik beberapa kesimpulan :

1. Indikator Kondisi Awal dapat dikatakan cukup maksimal karena semua pihak yang terlibat yang terlibat kolaborasi sudah membantu kerjasama dari awal, akan tetapi terdapat kendala atau konflik didalam berkolaborasi yaitu kurangnya kesadaran masyarakat karena kurangnya edukasi sehingga tidak menaati SOP yang berlaku.
2. Dari indikator Design Kelembagaan sudah maksimal karena sudah adanya aturan yang jelas yaitu Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Dumai Tahun 2023-2025 Pasal 1 ayat 1 dan dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) oleh pihak ketiga.
3. Dari indikator Kepemimpinan Fasilitatif dikatakan cukup baik karena didalam indikator ini karena melibatkan peran stakeholders. Seluruh stakeholders sudah terlibat, akan tetapi sering terjadi perbedaan keinginan dan miss communication yang terjadi sehingga mempengaruhi proses jalannya kolaborasi.
4. Indikator Proses Kolaborasi didalam *Collaborative Governance* diawali dengan Dialog Tatap Muka, yang dimana penulis menemukan permasalahan yang dimana

dialog tatap muka antar stakeholders tidak dilakukan sehingga menghambat proses kolaborasi itu sendiri. didalam sub indikator membangun kepercayaan kepercayaan antar stakeholders sudah cukup baik, hanya saja penulis menemukan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena adanya sarana prasarana yang tak kunjung dibenahi. didalam sub indikator komitmen didalam proses bahwa semua pihak yang terlibat didalam proses kolaborasi sudah baik, hanya saja tidak bisa dibantahkan bahwa setiap pihak yang terlibat pasti punya kepentingan dan tujuan masing-masing. didalam sub indikator pemahaman bersama dapat disimpulkan bahwa pihak pemerintah kurang melakukan kegiatan promosi sehingga calon pengunjung tidak mendapatkan informasi menarik sehingga pengunjung kurang tertarik guna datang ke pantai tersebut dan kurangnya kesadaran Masyarakat karena tidak adanya Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang mengakibatkan kebiasaan yang kurang baik yang sering dilakukan sehingga menimbulkan dampak negatif guna perkembangan pantai tersebut. Pada sub indikator Hasil Sementara yang dapat dilihat dari kolaborasi ini ialah pengelolaan Pantai jadi lebih teratur, selain itu dengan adanya kolaborasi ini berdampak pada ekonomi masyarakat setempat yang mendapatkan lapangan pekerjaan dan meningkatnya UMKM masyarakat setempat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ariesmansyah, A., Hari, R., Ariffin, B., & Respati, L. A. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal El-Riyasah*, 14(1).
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance*. didalam *Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Semarang: Universitas Diponegoro Press.[In Indonesian].
- Fadjarajani, S., Indrianeu, T., & Balasa Singkawijaya, E. (2021). Analisis Potensi Pariwisata Di Kabupaten Cianjur. *Jurnal Geografi*, 1
- Gusmiara Danasta, A., & Kurniawan, T. (2021). Tata Kelola Kolaboratif pada Penetrasi Jaringan Fixed Broadband di Indonesia. *JIAP*, 7(2), 158–163.
- Sugiono. (2022). *Metode Kajian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sunu Astuti, R., & Warsono, H.(2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik. Universitas Diponegoro press.
- Takome, S., Suwu, E., & Zakarias, D. (2021). Dampak Pembangunan Pariwisata Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Lokal Di Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Ilmiah Society*, 1.